



KR-Surya Adi Lesmana

**MARKA JAGA JARAK:** *Pengendara berhenti pada marka ruang henti khusus sepeda motor yang dibuat Satlantas Polres Sleman bersama Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PjN), Dinas Perhubungan DIY, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman di Simpang Empat Kentungan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Jumat (24/7). Marka prototip ini diperkenalkan untuk adaptasi kebiasaan baru.*

## PGRI JUGA MUNDUR DARI POP

# Kemendikbud Janji Lakukan Evaluasi

**JAKARTA (KR)** - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana melakukan evaluasi lanjutan untuk menyempurnakan Program Organisasi Penggerak (POP). Proses evaluasi lanjutan melibatkan pakar pendidikan dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga negara.

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim mengatakan, penyempurnaan dan evaluasi lanjutan dilakukan setelah pemerintah menerima masukan dari berbagai pihak. "Saya berterima kasih atas berbagai masukan yang ada. Kita semua sepakat, POP merupakan gerakan bersama masyarakat untuk memajukan pendidikan nasional," kata Mendikbud di Jakarta, Jumat (24/7) Malam.

Kemendikbud juga bakal semakin melibatkan peran organisasi-

organisasi yang selama ini telah andil dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. "Tanpa peran aktif organisasi dengan sejarah perjuangan yang panjang, pencapaian pendidikan kita tidak mungkin sampai pada titik ini. Untuk itu merupakan kehormatan bagi kami bisa berdiskusi dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak demi kesuksesan POP," ungkap Mendikbud.

Proses evaluasi lanjutan yang sedang disiapkan tentang tata lak-

sana POP dirancang meliputi verifikasi yang lebih ketat mengenai kredibilitas organisasi peserta program yang di dalamnya termasuk memerhatikan rekam jejak integritas dari organisasi tersebut, koordinasi keamanan serta keselamatan pelaksanaan program selama masa pandemi Covid-19 serta menerapkan proses audit keseluruhan dari proses yang telah dilakukan. Semuanya dilandasi semangat agar visi awal POP terlindungi secara berkelanjutan.

Sementara itu, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memutuskan mundur dan tidak bergabung dalam Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud. Hal itu menguatkan, bahwa efektivitas program dan menilai proses seleksi POP tidak jelas.

Demikian dikemukakan Ketua

Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi di Jakarta, Jumat (24/7). Dalam keterangan tertulisnya ia mengatakan, keputusan untuk tidak bergabung dengan POP Kemendikbud diambil berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Pengurus PGRI Provinsi dari seluruh Indonesia, Perangkat Kelengkapan Organisasi, Badan Penyelenggara Pendidikan dan Satuan Pendidikan PGRI.

"Dengan mempertimbangkan beberapa hal serta menyerap aspirasi dari anggota dan pengurus daerah, akhirnya PGRI memutuskan untuk tidak bergabung dalam POP Kemendikbud," tegas Unifah.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) juga sanksi POP Kemendikbud berjalan efektif. Terlebih di tengah kondisi pandemi Covid-19.

## MENSOS PERINTAHKAN

# Awasi Ekstra Ketat Anggaran

**JAKARTA (KR)** - Menteri Sosial Juliari P Batubara memerintahkan Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial untuk melakukan pengawasan ekstra ketat terhadap pelaksanaan anggaran.

"Secara internal dari Inspektorat Jenderal sudah saya perintahkan pengawasan ekstra ketat tentunya dibantu BPKP juga KPK kita minta pendapatnya," kata Mensos usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan oleh BPK dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Jakarta, Jumat (24/7).

Kemensos meraih opini WTP empat tahun berturut-turut dari BPK, namun menurut Juliari, se-

mua program harus terus dikelola dengan baik sehingga opini tersebut tetap bisa dipertahankan. Terutama program-program besar seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako yang anggarannya paling besar. Pengelolannya harus baik meski tidak mudah karena jumlah penerimanya juga besar.

Anggaran Kemensos saat ini naik menjadi Rp 124 triliun dari Rp 62,8 triliun di awal tahun karena tugas khusus di masa pandemi Covid-19 untuk menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos).

Anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Achsanul Qosasi mengatakan, anggaran Kemen-

sos sangat besar sehingga BPK perlu hadir untuk memberikan semangat agar program bisa dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran.

Salah satu rekomendasi BPK agar program terutama Bansos bisa tepat sasaran yaitu Pemerintah Daerah perlu memperbaiki data yang dikirimkan ke Kementerian Sosial.

"Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kewenangannya ada di masing-masing Pemda, bupati dan walikota, ke depan bagaimana mereka dapat memperbaiki datanya yang dikirim ke Kemensos sehingga nanti program-program Kemensos bisa tepat sasaran," ujar Achsanul. **(Ant)-f**

## DITURUNKAN DI TERMINAL WATES

# Penumpang Batuk-batuk, Meninggal

**WATES (KR)** - Setelah sempat dirawat beberapa hari di RSUD Wates, pria tak dikenal berusia sekitar 50 tahun yang diturunkan dari bus di Terminal Wates karena batuk-batuk, akhirnya meninggal, Jumat (24/7). Pria paruh baya itu rencananya hendak ke Bekasi Jabar.

Kasubbag Humas Polres Kulonprogo, Iptu I Nengah Jeffry mengatakan, pria itu sempat mendapat perawatan selama tiga hari di RSUD Wates, sejak Selasa (21/7) dan meninggal dunia Jumat (24/7) pukul 08.45. "Mendapat laporan ada pasien yang tidak ada identitas diri meninggal, petugas Inafis Polres Kulonprogo langsung ke RSUD Wates untuk melakukan identifikasi. Namun dari hasil pengecekan sidik jari belum berhasil diketahui identitasnya," jelasnya.

Sebelumnya, pria ini menumpang bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dari Terminal Giwangan Yogya dengan tujuan Bekasi. Di tengah perjalanan mengalami batuk-batuk, sehingga membuat penumpang lainnya merasa tidak nyaman. Akhirnya awak bus menurunkan di Terminal Wates yang langsung dievakuasi tim relawan ke RSUD Wates dengan protokol Covid-19.

Dari pemeriksaan polisi ditemukan tiket bekas bus PO Murni Jaya tujuan Yogya 19 Juli bernama Pardi. Di tasnya ditemukan obat-obatan dalam kemasan dengan tulisan RSUD Chasbullah Abdulmajid Bekasi. **(M-4)-f**

## HADAPI BENCANA HIDROMETEOROLOGI

# Masyarakat Perlu Terus Diedukasi

**JAKARTA (KR)** - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan masyarakat perlu diedukasi terus tentang ancaman bencana hidrometeorologi, sehingga mereka bisa lebih sadar dan melakukan upaya antisipasi lebih dini.

"Jadi saya lihat masyarakat itu harus diedukasi, kita tingkatkan kesadarannya bahwa ancaman bencana hidrometeorologi itu nyata," kata Kepala Sub Bidang Peringatan Dini Cuaca BMKG Agie Wandala Putra di Jakarta, Jumat (24/7).

Ia mengatakan, upaya edukasi itu merupakan salah satu langkah antisipasi yang dapat dilakukan Pemerintah agar masyarakat sendiri bisa memiliki kesadaran penuh terhadap potensi bencana yang dapat terjadi di lingkungan mereka dan kemudian dapat melakukan upaya antisipasi lebih dini untuk mengurangi kemungkinan dampak.

Bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang yang dapat menyebabkan tanah longsor dan bencana lain, menurut Agie, jika diakumulasi menyebabkan kerugian paling besar dibandingkan bencana lainnya.

Karena itu, langkah antisipasi yang di-

arahkan untuk menyadarkan masyarakat akan potensi bencana di sekitar mereka dianggap perlu dilakukan guna mengurangi kemungkinan kerugian yang lebih besar.

Agie Wandala Putra mengatakan, sistem respons terhadap bencana yang sudah diupayakan selama ini sebenarnya sudah sangat baik. Tetapi sayangnya, sistem respons yang sudah baik itu tidak diimbangi dengan kesadaran yang baik pula oleh masyarakat terhadap sistem peringatan dini yang sudah disosialisasikan.

Ia mengatakan, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sistem peringatan dini tersebut kemungkinan dikarenakan masyarakat Indonesia hidup di zona yang nyaman. "Maksudnya nyaman adalah bahwa kita ke luar rumah tidak akan meninggal karena cuaca. Kalau di daerah lintang tinggi, di daerah-daerah subtropis atau daerah-daerah yang mempunyai musim dingin, kalau kita enggak ngecek info cuaca, suhunya misalnya drop minus 15, itu bisa mengakibatkan kefatalan kalau kita ke luar rumah. Tapi kalau di Indonesia kan tidak, aman-aman saja," katanya. **(Ant)-d**

## RESPONS COVID-19 DI INDONESIA

# Australia Bantu Ventilator dan Lab Kritikal

**JAKARTA (KR)** -Pemerintah Australia telah menyerahkan 100 ventilator non-invasif ke Indonesia, sebagai bagian dari paket peralatan medis dan laboratorium kritikal senilai 2 juta dolar Australia (Rp 19,4 miliar). Peralatan medis ini untuk mendukung respons dan pemulihan Covid-19 di Indonesia.

Paket tersebut merupakan bagian dari komitmen Australia untuk bekerja dengan Indonesia dalam mendukung kecepatan respons kesehatan, kemanusiaan dan ekonomi serta kebutuhan pemulihan di Indonesia. Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gary Quinlan, mengatakan bahwa Australia berdiri berdampingan dengan Indonesia dalam perang melawan Covid-19.

"Pandemi sangat mem-

pengaruhi kawasan Indo-Pasifik, dan Australia akan terus bekerja dalam kemitraan dengan Indonesia untuk meminimalkan dampak Covid-19," kata Dubes Quinlan dalam siaran pers yang diterima KR, Jumat (24/7) petang.

Ventilator dan pasokan medis ini merupakan bagian dari paket respons Co-

vid-19 Australia senilai 21 juta dolar Australia (Rp 203,7 miliar) untuk Indonesia. Ini merupakan tambahan dari pengalihan program untuk aktivitas Covid-19 senilai hampir 45 juta dolar Australia dari program pembangunan Indonesia yang bernilai total 298,5 juta dolar Australia. **(Bro)-d**



KR-Istimewa

**Dubes Gary Quinlan (kiri) dan Doni Monardo.**

# Belanja Negara DIY Capai Rp 9,59 T

**YOGYA (KR)** - Realisasi belanja negara di wilayah DIY telah mencapai Rp 9,59 triliun atau 51,63 persen sampai dengan Semester I 2020. Realisasi tersebut meliputi realisasi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 3,77 triliun dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 5,82 triliun. Prioritas belanja di wilayah DIY lebih mengarah ke sektor kesehatan, bantuan sosial dan pemulihan ekonomi karena adanya pandemi Covid-19.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan DIY Heru Pudyo Nugroho menyampaikannya dinamika pelaksanaan APBN di DIY semester I 2020 sangat dipengaruhi dinamika kebijakan pemerintah dalam merespon dampak pandemi Covid-19. Sebagai instrumen fiskal, pemerintah telah sangat responsif memfungsikan APBN TA 2020 sebagai alat counter cyclical terhadap kinerja perekonomian yang terpukul sebagai akibat pandemi Covid-19 dengan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran.

"Realisasi pendapatan negara di DIY telah mencapai Rp 3,36 triliun sampai semester I 2020 atau meningkat 2,396 dibandingkan pada triwulan II 2019. Kinerja penyerapan belanja pemerintah pusat telah mencapai 38,39 persen atau Rp 3,77 triliun dari pagu sebesar Rp 9,81 triliun meliputi realisasi belanja pegawai Rp 2,15 triliun atau 45,77 persen, belanja barang Rp 1,25 triliun



KR-Fira Nurliani

**Heru Pudyo Nugroho**

atau 33,92 persen, belanja modal Rp 359,09 miliar atau 25,40 persen dan belanja bantuan sosial Rp 5,87 miliar atau 41,72 persen," tutur Heru di kantornya, Jumat (24/7).

Heru menuturkan besarnya penyerapan realisasi belanja bantuan sosial menunjukkan upaya pemerintah dalam melaksanakan program-program jaring pengaman sosial dalam rangka melindungi masyarakat miskin dan rentan dari risiko sosial ekonomi. Sementara itu realisasi belanja pegawai dan belanja barang di DIY mengalami kontraksi sejalan dengan upaya Pemerintah untuk melakukan refocusing dan efisiensi belanja yang tidak terkait langsung dengan penanganan pandemi Covid-19 hingga Juni 2020.

"Perlunya penyamaan feeling bahwa saat ini kita berada dalam suasana krisis kesehatan dan krisis ekonomi, sehingga diperlukan langkah-langkah ekstra ordinary yang cepat, efisien dan shortcut. Kuncinya ada di pelaksanaan APBN di DIY pada triwulan III 2020. Pemerintah dan seluruh otoritas terus berupaya agar keuangan negara tetap dikelola dengan hati-hati, terukur dan transparan untuk menjaga agar APBN tetap kredibel serta sinergi antar-Kementerian/Lembaga (K/L) dalam meniadakan berbagai hambatan pelaksanaan anggaran seperti simplifikasi juklak dan juknis," terangnya.

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di DIY mencapai Rp5,18 triliun atau 66,45 persen. **(Ira)-f**

## PENGACARA DJOKO TJANDRA

# Dilarang ke Luar Negeri

**JAKARTA (KR)** - Tim Khusus Bareskrim Polri mengajukan permohonan pencegahan dan penangkalan atau pencekalatan keluar negeri terhadap Anita Kolopaking, pengacara buronan Djoko Tjandra kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta.

"Pada 22 Juli 2020, Tim Khusus Bareskrim mengirim surat ke Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Bandara Soekarno-Hatta, terkait pencegahan keluar negeri atas nama Anita Dewi Anggraeni Kolopaking," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (24/7).

Surat pencegahan tersebut bernomor B/3022/VII/2020/Ditpidum tertanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Ferdy Sambo. Alasan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengajukan permohonan pencekalatan ke Imigrasi karena sedang melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan seseorang pejabat dengan sengaja membiarkan orang yang dirampas kemerdekaannya melarikan diri atau melepaskan diri dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan dan/atau memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian. Hal itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 426 KUHP dan/atau Pasal 221 KUHP, yang diduga dilakukan oleh terlapor Brigjen Prasetyo Utomo yang terjadi pada 1 Juni 2020 sampai 19 Juni di Jakarta dan Pontianak. **(Ant)-d**

## PENDAMPING DESA HARUS JEMBATANI

# Banyak Kebijakan Bupati Tidak Tepat

**PADANG (KR)** - Menteri Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri menyampaikan, tugas pendamping desa harus menjadi mata hati dan kaki tangannya kepala daerah.

Gus Menteri menjelaskan, selain melakukan pendampingan, pendamping desa juga dituntut lihai membaca dan menganalisa persoalan yang dihadapi masyarakat desa, kemudian dilaporkan kepada Bupati atau Walikota setempat.

"Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala daerah berdasarkan fakta yang ada di desa," ungkap Gus Menteri saat mengukuhkan Pendamping Desa Berdikari di Balai Kota Pariaman,

Sumatera Barat, Jumat (24/7).

Gus Menteri mengatakan, banyak kebijakan yang kurang tepat disebabkan keterbatasan untuk melihat langsung apa yang menjadi persoalan masyarakat.

Oleh karena itu, tugas pendamping desa harus mampu menjembatani antara dua kepentingan tersebut.

Saat ini, lanjut Gus Menteri, pihaknya sedang menyiapkan sebuah sistem yang bisa melihat potensi masing-masing desa di seluruh Indonesia dengan tujuan mempermudah pemodal untuk berinvestasi.

Sistem itu juga dapat memantau kinerja para pendamping desa melaksan pendampingan terhadap aparat desa.

**(Ati)-f**